

MELALUI AGRIBISNIS MENUJU KE SWASEMBADA PANGAN DAN PENINGKATAN EKSPOR INDONESIA*

William SOERYADJAYA

PENDAHULUAN

Dunia pada dewasa ini menghadapi perkembangan ekonomi dengan tantangan-tantangan yang cukup memprihatinkan. Selain krisis energi yang sudah mulai beberapa tahun yang lalu, terdapat pula krisis pangan yang harus dihadapi oleh beberapa negara yang sedang berkembang terutama negara-negara yang tingkat teknologinya masih rendah dan tidak memiliki sumber-sumber alam.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman selama tiga puluh lima tahun merdeka, kita mengetahui betapa peliknya masalah pangan di Indonesia. Masalah yang kita hadapi bukan hanya menyangkut peningkatan produksi tetapi juga meliputi hal-hal yang menyangkut distribusi dan hal-hal yang mengatur kedudukan para produsen yang sebagian terdiri dari petani. Peningkatan produksi pangan pada tingkat pertama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan domestik agar Indonesia dapat berswasembada di bidang pangan. Dengan swasembada di bidang pangan dapat dipastikan negara kita akan semakin kuat karena ketergantungan kita terhadap dunia luar (yang dalam dasawarsa 1980-an ini akan diwarnai oleh ketidakpastian) akan semakin kecil. Pada tingkat kedua kita mengharapkan Indonesia dapat menjadi negara pengekspor bahan pangan. Dengan mengekspor kita akan mendapat devisa yang sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan yang sedang kita laksanakan.

Untuk tujuan ini dibutuhkan langkah dan kebijaksanaan yang terarah dan terpadu. Dan mengingat pentingnya masalah ini, kami memberanikan diri mengemukakan pikiran kami tentang agribisnis dengan harapan permasalahan menjadi semakin jelas sehingga darinya dapat ditentukan

* Bahan yang diceramahkan di Universitas Airlangga, Surabaya, Pebruari 1981

langkah-langkah atau kebijaksanaan yang diperlukan dalam usaha menanggulangi masalah pangan di Indonesia dalam kaitannya dengan pembangunan yang sedang kita laksanakan.

I. KONSEP AGRIBISNIS

Istilah agribisnis lahir pada tahun 1957 di Universitas Harvard. Istilah ini pada mulanya dikemukakan J. Davis dan K. Goldberg dalam buku mereka yang berjudul "A Concept of Agribusiness". Menurut kedua penulis ini definisi agribisnis adalah sebagai berikut: "Agribusiness is the sum total of all operations involved in the manufacture and distribution of farm supplies, production activities on the farm; and the storage, processing and distribution of farm commodities and items made from them."¹

Definisi ini mengandung arti yang sangat luas karena selain meliputi pertanian juga meliputi peternakan. Kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan tidak hanya terbatas kepada usaha produksi tetapi juga menyangkut usaha pengolahan, penyaluran dan penyimpanan. Sesuai dengan definisi tersebut maka struktur vertikal agribisnis dapat diterangkan dengan contoh sebagai berikut: Perusahaan bibit dan pupuk menjual hasil produksinya kepada petani; bahan-bahan tersebut digunakan oleh petani sehingga menghasilkan gandum. Gandum diolah oleh pabrik menjadi tepung terigu, yang kemudian disalurkan oleh grosir dan pengecer kepada konsumen. Terdapat hubungan yang erat antara sektor-sektor tersebut dan keseluruhannya merupakan satu kesatuan.

Kiranya menjadi jelas bahwa agar usaha itu dapat berhasil maka seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus saling menunjang. Petani dalam hal ini membutuhkan input yang baik seperti pupuk, bibit unggul, tanah yang subur dan irigasi. Selain itu dari petani itu sendiri dituntut adanya ketrampilan agar produksi dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Demikian juga untuk pengolahan misalnya dibutuhkan tenaga-tenaga trampil, mesin-mesin dan bahan olahan yang baik.

Dengan demikian dapat dikatakan kegiatan agribisnis merupakan kegiatan yang bersifat luas. Untuk dapat berhasil dalam kegiatan ini banyak faktor yang harus dipertimbangkan dan perlu mendapat perhatian khusus. Dan ini akan kami utarakan dalam bagian yang berikut. Untuk ini kami akan mem-

1 J.D. Drilon, Jr., *Agribusiness Management Resource Materials* (Volume I) hal. 15, Tokyo 1971

batasi diri dengan membahas agribisnis yang hanya mencakup tanaman bahan pangan, tanaman perkebunan rakyat dan tanaman perkebunan besar, jadi hanya terbatas pada bidang pertanian.

II. MENUJU SWASEMBADA PANGAN DAN PENINGKATAN EKSPOR

Kiranya tidak asing lagi bagi kita teori Malthus yang menggambarkan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk lebih besar dari tingkat pertumbuhan pangan. Walaupun pada dasarnya teori ini tidak mutlak benar, tetapi bahaya yang digambarkan oleh Malthus dalam masa yang lampau sudah kita rasakan sekarang. Bahaya krisis pangan semakin jelas terlihat, bahkan beberapa negara telah mengalaminya.

Indonesia sampai saat ini belum pernah mengalami krisis pangan seperti yang dialami oleh beberapa negara di Afrika. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita bebas dari ancaman bahaya krisis pangan. Sampai tahun ini Indonesia masih mengimpor kebutuhan pangan dari luar negeri dalam jumlah dan nilai yang tidak kecil walaupun negara kita mempunyai potensi untuk menghasilkannya sendiri. Tabel berikut ini memperlihatkan impor beberapa komoditi pangan untuk tahun 1979.

Tabel 1

IMPOR BEBERAPA KOMODITI PANGAN 1979		
Komoditi	Volume	Nilai CIF \$ AS
Beras	1,9 juta ton	596,3 juta
Gula	0,3 juta ton	127,6 juta
Minyak kelapa	27,3 juta liter	22,4 juta
Kacang tanah	4.964 ton	3,1 juta
Jagung	70.000 ton	10,3 juta
Jumlah		759,7 juta

Sumber: Biro Pusat Statistik, *Impor Indonesia 1979*

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk tahun 1979 kita harus mengeluarkan devisa sebanyak 759,7 juta \$ AS untuk mengimpor pangan (beras, gula, minyak kelapa, kacang tanah dan jagung). Memang sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 1979 (lihat Tabel 2), terdapat peningkatan produksi

beberapa komoditi pangan di Indonesia. Dalam jangka waktu sepuluh tahun kita hanya dapat meningkatkan produksi jagung sebesar 44,1%, ubi kayu 22,1%, kacang tanah 56,6% dan kedelai sebesar 73,3%. Dan hasil produksi tersebut belum memadai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Tabel 2

PRODUKSI BAHAN PANGAN 1969-1979 (1.000 ton)						
Jenis Tanaman	1969	1970	1971	1972	1973	1974
Padi*	18.013	19.324	20.182	19.386	21.481	22.464
Padi Sawah*	16.421	17.702	18.588	17.895	19.807	21.053
Padi Ladang*	1.592	1.622	1.594	1.491	1.674	1.411
Jagung	2.293	2.825	2.606	2.254	3.690	3.011
Ubi Kayu	10.917	10.478	10.690	10.385	11.186	13.031
Ubi Jalar	2.260	2.175	2.211	2.066	2.387	2.469
Kacang Tanah	267	281	284	282	290	307
Kedele	389	498	516	518	541	589
	1975	1976	1977	1978	1979	
Padi*	22.331	23.301	23.347	25.771	26.350	
Padi Sawah*	20.850	21.852	21.808	24.172	24.819	
Padi Ladang*	1.481	1.449	1.539	1.599	1.531	
Jagung	2.903	2.572	3.143	4.029	3.305	
Ubi Kayu	12.546	12.191	12.488	12.902	13.330	
Ubi Jalar	2.433	2.381	2.460	2.083	2.043	
Kacang Tanah	380	341	409	446	418	
Kedele	590	522	523	617	674	

* Produksi Gabah Kering

Sumber: Biro Pusat Statistik, *Indikator Ekonomi*, Juli 1980

Gambaran atau keadaan seperti ini tidak menguntungkan pihak Indonesia. Ini berarti, bahwa untuk memenuhi kebutuhan pangan (kebutuhan pokok), Indonesia masih tergantung kepada dunia luar. Dari segi ekonomi hal ini juga tidak menguntungkan karena beberapa hal yang di antaranya dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Melihat potensi yang kita miliki (tanah, tenaga kerja, keadaan alam), kebutuhan akan pangan dapat kita penuhi dari produksi dalam negeri. Sehingga bila usaha seperti ini tidak dilakukan, maka itu berarti kita tidak memanfaatkan sumber-sumber yang kita miliki (waste of resources).
2. Untuk beberapa jenis bahan pangan tertentu biaya produksi di dalam negeri jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan biaya produksi luar negeri. Sehingga dengan mengimpor komoditi tersebut dan menjualnya di dalam negeri dengan harga yang lebih rendah dari harga impor berarti pemerintah harus memberi subsidi yang seharusnya tidak perlu.

Dari uraian di atas kiranya menjadi semakin jelas bahwa masalah pangan perlu ditanggulangi secara serius. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1978, hal ini ditegaskan karena antara lain disebutkan bahwa dalam Pelita III pembangunan dititikberatkan pada pembangunan bidang pertanian menuju swasembada pangan. Sesuai dengan Pelita III tingkat pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar rata-rata 6,5% setiap tahun. Bidang pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan diperkirakan tumbuh sebesar 3,5% setiap tahun. Produksi beras diperkirakan akan meningkat dengan 4,3% per tahun, sedang produksi palawija (second crops), sayur-mayur dan buah-buahan masing-masing berkisar antara 5-7% dan 2-10% setiap tahun.

Untuk mencapai tujuan ini dibutuhkan dana yang tidak kecil jumlahnya yang diharapkan dapat bersumber dari pemerintah dan pihak swasta. Untuk maksud tersebut pemerintah telah mengambil beberapa langkah tertentu dan diantaranya dapat disebutkan:

1. Penyediaan dan penyempurnaan prasarana seperti pengairan, pembuatan dan perbaikan jalan.
2. Memberi bantuan keuangan berupa kredit-kredit.
3. Memberi penerangan tentang cara bercocok tanam.
4. Melakukan dan merangsang dilakukannya penyelidikan untuk menemukan bibit-bibit unggul bagi usaha pertanian.
5. Mendirikan proyek "Nucleus Estate Smallholder Development Scheme" (NES). Proyek ini didirikan berdasarkan sistem Bapak Angkat, di mana petani kuat (perkebunan besar) membantu petani lemah yang berusaha di sekitar wilayah perkebunan tersebut. Kerja sama ini memungkinkan kelompok petani untuk memperoleh bantuan dan fasilitas dari perkebunan besar dan di lain pihak akan menjamin tersedianya bahan baku bagi perkebunan tersebut.
6. Menggalakkan investasi dalam agribisnis dengan membuka kesempatan bagi penanaman modal di bidang tanaman padi, jagung/sorghum, kacang-kacangan, ubi-ubian, sayur-mayur dan tanaman hias dan memberi keringanan dalam bidang perpajakan (tax holiday).

Tindakan yang disebut terakhir ini dapat dikatakan merupakan tindakan yang tepat baik dilihat untuk tujuan jangka pendek (swasembada dalam hal pangan) dan tujuan jangka panjang (sebagai negara pengekspor bahan pangan dan hasil perkebunan atau hasil produksi yang diolah darinya).

Beberapa masalah pokok yang kita hadapi dalam usaha pembangunan adalah masalah kesempatan kerja, pengangguran dan urbanisasi. Ketiga masalah ini saling berkaitan satu sama lain. Tetapi permasalahannya sangat pelik karena perluasan kesempatan kerja tidak berbanding lurus dengan pengurangan pengangguran. Hal seperti ini terjadi bukan hanya karena adanya pertambahan angkatan kerja tetapi juga disebabkan mobilitas para angkatan kerja yang sangat lambat. Kebanyakan mereka yang menganggur ataupun setengah menganggur adalah mereka yang sebelumnya bergerak di sektor pertanian. Menurut penyelidikan ternyata untuk Pulau Jawa, luas tanah yang diusahakan masing-masing petani rata-rata adalah 0,6 ha. Jumlah ini sudah barang tentu kurang memadai bagi para petani. Karena itu mereka mencoba mencari pekerjaan di luar bidang pertanian. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak mempunyai kemampuan atau keahlian seperti yang dibutuhkan oleh sektor di luar bidang pertanian (misalnya perindustrian, bangunan dan jasa). Dan di lain pihak mereka tidak mempunyai modal yang cukup untuk melakukan aktivitas ekonomi, misalnya perdagangan. Dengan demikian walaupun terbuka kesempatan kerja di luar bidang pertanian, kesempatan kerja tersebut tidak segera dapat terisi.

Dengan menggalakkan agribisnis kita mengharapkan akan terbuka lapangan kerja bagi para petani atau bagi mereka yang sebelumnya bergerak di bidang pertanian. Dengan demikian hambatan yang terjadi karena kurang mobilnya angkatan kerja sesedikitnya dapat teratasi dan ini juga berarti menaikkan pendapatan golongan masyarakat Indonesia atau mereka yang paling membutuhkan pertambahan pendapatan.

Untuk menjamin pembiayaan pembangunan diperlukan banyak devisa. Hal tersebut dapat dicapai dengan peningkatan ekspor barang-barang utama, di samping pemasaran komoditi baru di pasaran internasional. Dapat diberitahukan, bahwa pada tahun 1979 nilai ekspor minyak dan bahan bakar merupakan 65% dari nilai ekspor Indonesia seluruhnya. Akhir-akhir ini di sejumlah negara industri sedang dilakukan usaha-usaha yang menuju pada penghematan energi; di samping itu juga terdapat kegiatan-kegiatan dalam pencarian sumber energi baru, antara lain energi matahari, panas bumi, pencairan batu bara, energi nuklir dan sebagainya. Dapat diperkirakan, bahwa tingkat pertumbuhan permintaan minyak dan bahan bakar pada waktu yang akan datang mungkin tidak akan sebesar dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Ini berarti, bahwa penerimaan devisa yang dibutuhkan untuk

menjamin kepastian pembangunan akan terpengaruh pula. Untuk dapat mengurangi kepekaan penghasilan ekspor terhadap minyak dan bahan bakar lainnya, maka usaha ke arah diversifikasi ekspor harus ditingkatkan. Mengingat, bahwa struktur perekonomian Indonesia masih agraris, diversifikasi antara lain dapat dilakukan melalui peningkatan ekspor komoditi yang dihasilkan oleh bidang pertanian.

Di samping itu dari kegiatan agribisnis seperti yang diuraikan sebelumnya kita mengharapkan keuntungan-keuntungan lain yang diantaranya dapat disebutkan:

1. Penghematan devisa sampai saat di mana kita tidak perlu mengimpor dan merupakan sumber devisa kalau kita sudah mampu mengekspor.
2. Dapat menyukkseskan usaha transmigrasi dan tujuan pokok dari transmigrasi itu sendiri karena kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan akan mengambil lokasi di Luar Pulau Jawa.
3. Sumber pendapatan bagi negara (melalui pajak dan bea).
4. Mengurangi arus urbanisasi dan segala akibat negatif yang ditimbulkannya.
5. Karena usaha yang dimaksudkan merupakan usaha yang terintegrasi mulai dari produksi sampai pemasaran, maka di dalam prosesnya secara terarah kemampuan atau ketrampilan para angkatan kerja dapat ditingkatkan.

Tetapi walaupun demikian, menggalakkan dan menyukkseskan kegiatan agribisnis bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk itu dibutuhkan perencanaan dan penanganan yang sungguh-sungguh. Kegiatan seperti ini akan sulit dilakukan bila yang menangani hanya pihak swasta atau tanpa bantuan dan pengarahan dari pihak pemerintah. Berbagai macam faktor yang perlu diperhatikan yang dalam bagian berikut ini akan diuraikan secara lebih terperinci.

III. USAHA MENYUKSESKAN AGRIBISNIS

Dalam uraian terdahulu telah dikemukakan beberapa manfaat pokok yang dapat diperoleh dari kegiatan agribisnis. Tetapi untuk dapat memperoleh keuntungan-keuntungan yang dimaksudkan diperlukan perhatian atau kebijaksanaan yang diantaranya akan meliputi:

1. Di dalam peraturan mengenai penanaman modal di bidang tanaman pangan bahwa pembukaan areal baru minimal 300 hektar untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 1.000 hektar untuk Penanaman Modal Asing (PMA) kecuali untuk bidang penanaman sayur-sayuran. Membuka

dan mengusahakan areal yang luas seperti ini membutuhkan biaya yang cukup besar belum lagi termasuk prasarana dan sarana (seperti jalan-jalan, jembatan, alat-alat, pengangkutan yang dapat menghubungkan tempat dilakukannya produksi dan konsumen). Keseluruhan biaya tersebut masih sulit sekali dipikul oleh pihak swasta yang berarti kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta sangat dibutuhkan. Untuk tujuan ini sangat diharapkan agar pemerintah berperan untuk memberikan bantuan di bidang prasarana dan sarana sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan selaras, dan dengan demikian pemerintah dengan cepat memperoleh dana yang ditanamkannya melalui pajak atas keuntungan atau pendapatan perusahaan.

2. Pemilihan lokasi dalam hal ini juga merupakan faktor penting. Menurut peraturan yang menyangkut hal ini, untuk kegiatan PMA, secara umum dikatakan untuk diusahakan di Luar Pulau Jawa. Kerja sama secara lebih baik antara pihak pemerintah dan pihak swasta dalam hal ini sangat dibutuhkan. Pihak pemerintah dalam hal ini perlu memberi pengarahan dan bimbingan dalam memilih lokasi tertentu dengan menghubungkannya dengan rencana pembangunan wilayah yang akan dilaksanakan. Dengan tindakan seperti ini diharapkan pihak swasta menjadi lebih terangsang melakukan investasi karena adanya kepastian mengenai prospek kegiatan yang akan dilakukan.
3. Dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa untuk beberapa bahan pangan tertentu, biaya untuk menghasilkannya adalah lebih rendah di dalam negeri dibandingkan dengan luar negeri. Tetapi kalau diteliti lebih lanjut ternyata harga yang berlaku di dalam negeri dan luar negeri tidak atau kurang memberi rangsangan bagi pihak penanam modal untuk menanamkan modalnya. Hal ini terjadi karena untuk beberapa komoditi tertentu (misalnya beras), pemerintah menentukan harga dan tidak memperkenankan untuk melakukan ekspor. Memang pemerintah menyadari hal ini dan ini terbukti dari tindakan pemerintah yang setiap tahun menaikkan harga pembeliannya. Kebijakan seperti ini perlu ditingkatkan. Dengan perkataan lain pemerintah sebaiknya menyesuaikan harga komoditi pertanian tertentu, sesuai situasi dan kondisi supaya tidak menimbulkan persoalan bagi masyarakat. Dan yang penting dari tindakan semacam ini adalah untuk menolong lapisan masyarakat yang tingkat pendapatannya masih rendah, yaitu masyarakat yang bergerak di bidang pertanian dan yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia. Dengan peningkatan agribisnis pendapatan petani akan meningkat; ini akan memperbesar aktivitas perekonomian, sehingga pendapatan nasional akan naik.
4. Dalam pembukaan areal baru tentu timbul masalah yang berhubungan dengan pemilikan dan pemindah milikan tanah. Persoalannya mungkin saja tidak bisa diselesaikan tanpa adanya campur tangan dari pemerintah.

Dengan demikian perhatian terhadap masalah ini perlu dicurahkan sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat ataupun ketidakpastian bagi para pengusaha atau penanaman modal.

5. Para pengusaha di dalam agribisnis perlu memperhatikan kegiatan pertanian masyarakat di lokasi usahanya. Agar dengan demikian kegiatan usaha tersebut dapat ikut membantu dan menampung kegiatan masyarakat yang sudah ada. Dengan bantuan pemerintah dapat dilakukan usaha-usaha pembinaan kepada masyarakat.
6. Dalam uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa salah satu keuntungan dari agribisnis adalah dapat menyukseskan usaha transmigrasi dan tujuan pokok dari transmigrasi itu sendiri. Adalah jelas bahwa tujuan dari transmigrasi bukan hanya untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk. Tetapi yang paling pokok adalah memperbaiki taraf hidup dari masyarakat khususnya mereka yang ditransmigrasikan. Memang bila agribisnis yang berlokasi di Luar Pulau Jawa berhasil baik, dengan sendirinya dapat mengundang transmigrasi spontan. Tetapi memperhitungkan dana yang kita punyai dan peruntukkan untuk pembangunan masih sangat terbatas, adalah merupakan kegiatan yang tepat bila usaha transmigrasi dapat dikaitkan dengan agribisnis. Dengan demikian maka dana yang terbatas tersebut (baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta) dapat dipergunakan secara lebih efektif. Kebijakan seperti ini tentu menuntut adanya kerja sama antara pihak penanam modal dan pihak pemerintah.
7. Tujuan jangka panjang pembangunan sektor pertanian di Indonesia pada dasarnya selain agar kita dapat berdiri sendiri atau menghasilkan sendiri bahan pangan yang kita butuhkan, juga agar Indonesia dapat mengekspornya ke luar negeri. Bila hal ini dapat diterima maka sudah selayaknya bila mulai dari saat sekarang dilakukan persiapan-persiapan ke arah tujuan tersebut, persiapan-persiapan yang dimaksudkan dapat berupa misalnya, penelitian-penelitian tentang jenis tanaman yang mempunyai harapan dapat diperdagangkan di pasar internasional; penyempurnaan dalam bidang yang menyangkut prosedur sehingga komoditi yang dihasilkan dapat sampai di tempat tujuan secara cepat. Hal ini merupakan hal yang penting; karena daya tahan hasil produksi pertanian pada umumnya relatif singkat.
8. Ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat cepat dan dalam banyak hal kemajuan tersebut sangat membantu kita dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Kemampuan kita misalnya dalam hal membuat hujan buatan sangat membantu dalam usaha mengembangkan usaha pertanian. Kemampuan kita dalam menemukan bibit-bibit unggul, cara pengairan baru, cara bercocok tanam sangat membantu dalam usaha meningkatkan produksi. Tetapi sehubungan dengan usaha agribisnis terdapat masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh ilmu pengetahuan itu sendiri atau kalaupun dapat dipecahkan, penanggulangannya terlambat. Misalnya

gangguan alam seperti cuaca atau gangguan hama. Hal ini perlu mendapat perhatian.

9. Salah satu tujuan perusahaan yang berkecimpung dalam agribisnis adalah untuk memperoleh laba. Karena itu pengelolaan perusahaan harus dilakukan dengan baik; dalam hal ini prinsip-prinsip manajemen harus diterapkan. Menurut pendapat kami manajemen tingkat rendah perlu diikutsertakan dalam usaha memperkembangkan kegiatan perusahaan. Dalam pembuatan rencana perusahaan, sebaiknya diadakan kerja sama antara semua tingkat manajemen; partisipasi dapat dilakukan dalam kelompok kecil, di mana dibahas persoalan untuk meningkatkan mutu produksi. Hasil kelompok dapat dijadikan pertimbangan untuk manajemen puncak. Selanjutnya dapat dibuat rencana perusahaan, di mana pada waktu-waktu tertentu diadakan tinjauan kembali, apakah usaha yang dicapai perusahaan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dengan demikian perusahaan berfungsi lebih baik. Konsep ini dinamakan "Total Quality Control Concept" yang berhasil diterapkan di Jepang. Kami yakin, bahwa usaha ini dapat dipraktekkan pula di sektor agribisnis di Indonesia.

Kiranya masih banyak lagi faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian dalam usaha menyukseskan agribisnis. Tetapi dengan uraian di atas diharapkan gambaran permasalahan yang timbul dalam usaha menyukseskan usaha tersebut menjadi semakin jelas.

IV. KESIMPULAN

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1978 disebutkan bahwa prioritas pembangunan dalam Pelita III dititikberatkan pada perkembangan bidang pertanian menuju swasembada pangan. Kebijakan yang bersifat jangka pendek ini dapat dikatakan sangat tepat karena dengan swasembada dalam bidang pangan kita memperoleh banyak keuntungan baik dilihat dari segi ekonomi, politik dan sosial. Keuntungan tersebut akan jelas terlihat bila kita memperhatikan negara kita yang sampai saat ini masih tergantung kepada dunia luar dalam hal pangan atau terpaksa mengimpor sebagian kebutuhan pangan pada hal kita sendiri mampu untuk menghasilkannya.

Pembangunan sektor pertanian dalam bentuk peningkatan produksi khususnya komoditi pangan pada hakekatnya bukan hanya ditujukan untuk mencapai swasembada khususnya bila dilihat untuk jangka panjang. Dalam jangka panjang kita mengharapkan dapat mengekspor hasil produksi yang dimaksudkan karena dengan demikian kita akan dapat mempercepat usaha pembangunan yang sedang kita laksanakan.

Salah satu usaha untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan adalah melalui agribisnis. Kegiatan seperti ini sangat penting karena keuntungan yang dapat diperoleh darinya sangat banyak dan yang terutama adalah peningkatan lapangan kerja yang dalam gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat; menghemat dan merupakan sumber devisa, sumber pendapatan bagi negara dan mengurangi arus urbanisasi.

Pemerintah dengan kebijaksanaannya telah mulai menggerakkan agribisnis akan tetapi agar usaha ini dapat berjalan seperti yang diharapkan maka dibutuhkan perencanaan dan penanganan yang secara teratur dan terpadu dan untuk ini dibutuhkan kerja sama yang saling menunjang antara pihak pemerintah dan pihak swasta (penanam modal). Kerja sama yang dimaksudkan akan meliputi usaha bersama dalam menanggulangi masalah-masalah yang kini dihadapi dan yang akan dihadapi.

Kami juga ingin memberi perhatian pada faktor manusia. Walaupun terdapat sarana dan perencanaan yang baik, tetapi tanpa usaha yang sungguh-sungguh dari orang-orang yang bersangkutan, agribisnis tidak akan dapat berkembang dengan baik. Pembangunan negara tidak hanya tergantung pada jumlah dana yang dapat dipergunakan tetapi faktor manusia memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu dalam agribisnis ini setiap manusia yang terlibat perlu menyadari kontribusi dan peranannya dalam pembangunan negara. Dengan sikap mental yang demikian itu, kami yakin bahwa pada suatu saat melalui agribisnis kita dapat menuju ke swasembada pangan dan peningkatan ekspor.

Akhirnya perlu juga kami kemukakan di sini bahwa dalam agribisnis ada banyak faktor-faktor ketidakpastian di luar jangkauan kemampuan manusia. Ketidakpastian ini tentunya merupakan tantangan dan rangsangan bagi kita untuk berusaha. Dengan adanya ketidakpastian ini juga hidup kita menjadi lebih dekat dengan kekuatan di luar kita yaitu Pencipta kita. Karena kita makin dapat merasakan bahwa manusia dapat berusaha, tapi pada akhirnya juga Tuhan yang menentukan segalanya.



Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti maupun lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintah dan umum, CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) menyediakan penerbitan berupa majalah dan buku-buku:

ANALISA

terbitan berkala, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh staf CSIS maupun dari luar CSIS. Termasuk dalam seri ini adalah MONOGRAF yang membahas satu analisa tertentu. Harga per eks Rp. 500,— langganan setahun (12 nomor) Rp. 6.000,— sudah termasuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa Rp. 4.800,—

THE INDONESIAN QUARTERLY

Majalah triwulan, memuat karangan-karangan hasil pemikiran, penelitian, analisa dan penilaian yang bersangkutan paut dengan masalah-masalah aktual Indonesia di forum nasional maupun internasional. Harga per eks Rp. 800,—, langganan setahun (4 nomor) Rp. 3.200,—

BUKU—BUKU

hasil penulisan staf CSIS baik mengenai strategi, ekonomi, ideologi, politik, hubungan internasional, pembangunan, hankam, sosial budaya dan lain-lain.

Penerbitan-penerbitan tersebut di atas dapat diperoleh di Toko-toko Buku, atau langsung pada:

BIRO PUBLIKASI — CSIS
CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES
 Jl. Kesehatan 3/13, Jakarta Pusat Telepon 349489

Untuk menunjang kegiatan pengkajian CSIS juga menyediakan PERPUSTAKAAN dan CLIPPINGS yang terbuka untuk pencinta pengetahuan, analis dan peneliti dengan koleksi yang eksklusif, penyediaan data yang lengkap dan informasi yang cepat. Untuk keperluan tersebut hubungilah:

PERPUSTAKAAN CSIS dan BIRO INFORMASI DAN DATA CSIS
 Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat, Telepon 356532-5

